



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI SUWARTONO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **270713**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 686.000.000

1. Tanah Seluas 710 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/70 m2 di KAB / KOTA
MADIUN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/155 m2 di KAB / KOTA KOTA
MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 55 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp.
23.000.000
5. Tanah Seluas 54 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp.
28.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 281.500.000

1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI
Rp. 52.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR MATIC BEAT Tahun 2015,
HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
4. MOBIL, MITSHUBISHI EXPANDER EXCEED Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
5. LAINNYA, UNITED SEPEDA LISTRIK Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 55.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	20.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	207.021.843
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.250.021.843
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.250.021.843

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.